

Inilah Alasan Saudi Sebut Al-Qard al-Hassan Organisasi Teroris

written by Harakatuna



Harakatuna.com. Riyadh-Arab Saudi menetapkan asosiasi Al-Qard al-Hassan (AQAH) sebagai organisasi teroris. Hal itu karena AQAH disebut mendanai kelompok milisi Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon.

“(AQAH) terkait kegiatan yang mendukung organisasi teroris Hizbullah, karena ia bekerja untuk mengelola keuangan dan pendanaan Hizbullah, termasuk mendukung tujuan militernya,” kata *Saudi Press Agency* dalam laporannya pada Rabu (27/10).

Dengan langkah itu, Saudi akan membekukan semua aset AQAH yang berada di negaranya. Saudi pun melarang individu, lembaga keuangan, dan bisnis melakukan transaksi langsung atau tidak langsung dengan AQAH.

Keputusan Saudi menunjuk AQAH sebagai organisasi teroris terjadi tak lama setelah Menteri Informasi Lebanon George [Kordahi](#) membuat pernyataan yang

menyudutkan Riyadh, termasuk Uni Emirat Arab (UEA). Dia menyinggung keterlibatan kedua negara dalam perang Yaman.

Kordahi mengatakan, kelompok Houthi di Yaman membela diri. Kordahi menggambarkan perang Yaman sebagai sebuah kesia-siaan. Saudi, UEA, Bahrain, dan Kuwait telah memanggil utusan Lebanon mereka sebagai protes atas komentar Kordahi.

Sebelum Saudi, Amerika Serikat (AS) telah terlebih dulu menetapkan AQAH sebagai organisasi teroris pada 2007. Sebab selama itu AS merasa pernah mendapat tekanan dari beberapa aksi yang dilakukan AQAH ini.

Selain itu AS juga memiliki alasan yang sama, yakni karena AQAH memberi dukungan keuangan pada Hizbullah.

Menurut Departemen Keuangan AS, [AQAH](#) “menyamar” sebagai organisasi nonpemerintah di bawah naungan lisensi lembaga swadaya masyarakat yang diberikan Kementerian Dalam Negeri. AQAH memberikan layanan berkarakteristik bank untuk mendukung Hizbullah sambil menghindari perizinan yang tepat dan pengawasan aturan.

“Dengan menimbun mata uang keras yang sangat dibutuhkan ekonomi Lebanon, AQAH memungkinkan Hizbullah membangun basis dukungannya sendiri dan membahayakan stabilitas negara Lebanon,” kata Departemen Keuangan AS.